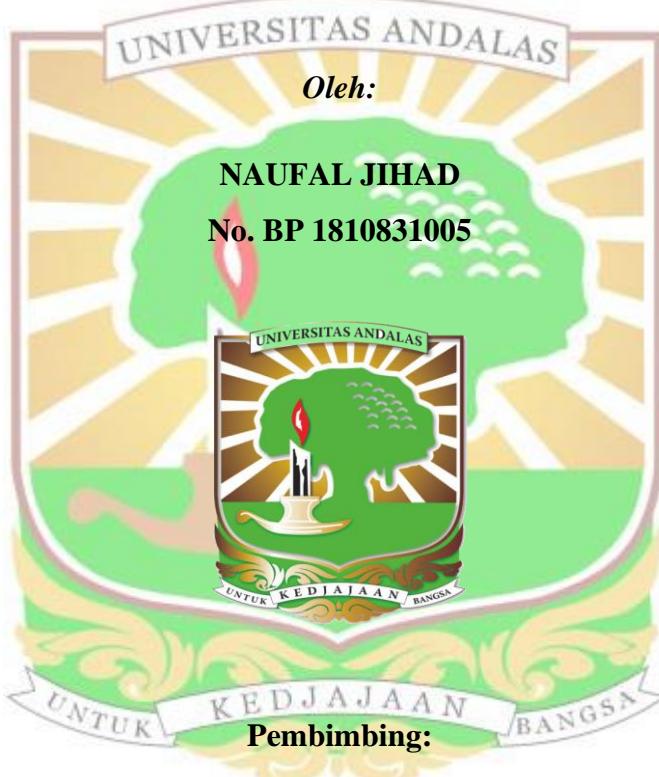


**POLITISASI BIROKRASI DALAM PELAKSANAAN  
MUTASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KOTA PADANG TAHUN 2021**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**1. Dr. Aidinil Zetra, MA**

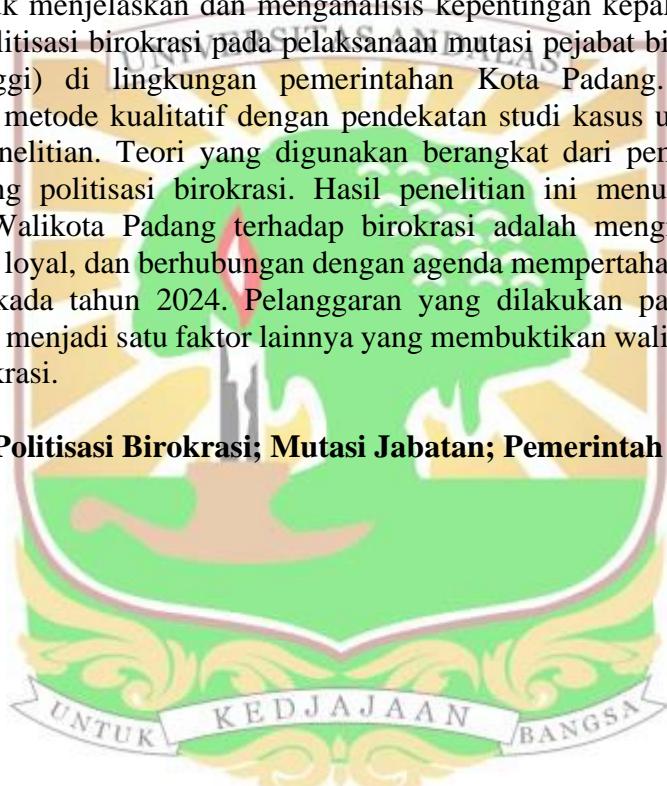
**2. Drs. Tamrin, M.Si**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

## ABSTRAK

Politisasi Birokrasi merupakan fenomena yang sangat erat kaitannya dengan tantangan perwujudan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah, karena politisasi birokrasi merupakan suatu kepentingan yang berpengaruh buruk bagi pelaksana birokrasi di pemerintahan. Kota Padang menjadi salah satu daerah yang memiliki indikasi adanya politisasi birokrasi yang dilakukan oleh kepala daerah, tepatnya pada pelaksanaan mutasi jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Padang tahun 2021. Adanya pelanggaran mekanisme mutasi jabatan yang dilakukan oleh Walikota Padang, kemudian mendapat teguran dari pihak KASN. Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis kepentingan kepala daerah dalam melakukan politisasi birokrasi pada pelaksanaan mutasi pejabat birokrasi (jabatan pimpinan tinggi) di lingkungan pemerintahan Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Teori yang digunakan berangkat dari pemikiran Barbara Geddes tentang politisasi birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Walikota Padang terhadap birokrasi adalah menginginkan mesin birokrasi yang loyal, dan berhubungan dengan agenda mempertahankan kekuasaan untuk Pemilukada tahun 2024. Pelanggaran yang dilakukan pada pelaksanaan mutasi jabatan menjadi satu faktor lainnya yang membuktikan walikota melakukan politisasi birokrasi.

**Kata Kunci:** Politisasi Birokrasi; Mutasi Jabatan; Pemerintah Kota Padang



## ABSTRACT

The politicization of bureaucracy is a phenomenon that is closely related to the challenge of realizing bureaucratic reform in the local government environment because the politicization of the bureaucracy is an interest that has a negative effect on bureaucratic implementers in government. Padang City is one of the regions that has indications of bureaucratic politicization carried out by regional heads, precisely in the implementation of position transfers within the Padang City government in 2021. The violation of the position transfer mechanism was carried out by the Mayor of Padang, who then received a warning from the KASN. This thesis aims to explain and analyze the interests of regional heads in politicizing the bureaucracy in the implementation of mutation of bureaucratic officials (high leadership positions) in the Padang City government environment. This study uses a qualitative method with a case study approach to answer research questions. The theory used departs from the thoughts of Barbara Geddes about the politicization of the bureaucracy. The results of this study indicate that the Mayor of Padang's interest in the bureaucracy is wanting a loyal bureaucratic machine, and is related to the agenda of maintaining power for the 2024 Pemilukada. Violations committed in the implementation of job transfers are another factor that proves the mayor is politicizing the bureaucracy.

**Keywords:** *Politicization of Bureaucracy; Position Transfer; Padang city Government*

